

PENULISAN HUKUM

IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN *FLIGHT INFORMATION*
***REGION* ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA**
TERHADAP KEDAULATAN WILAYAH UDARA INDONESIA



Diajukan oleh :
Steven Garuda

NPM : 160512507
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan
Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN FLIGHT INFORMATION
REGION ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA
TERHADAP KEDAULATAN WILAYAH UDARA INDONESIA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Juli 2023
Tempat : Ruang dosen lantai 2

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

Sekretaris : Nanda Indrawati, S.H., M.H.

Penguji : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M. Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan Dekan Fakultas
Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum.

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN FLIGHT INFORMATION
REGION ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA
TERHADAP KEDAULATAN WILAYAH UDARA INDONESIA**



**Diajukan oleh:
Steven Garuda**

**NPM : 160512507
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan
Internasional**

Telah disetujui Untuk Pendadaran
Dosen Pembimbing Tanggal : 12 Juni 2023
Tanda Tangan :

Nanda Indrawati, S.H., M.H

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN FLIGHT INFORMATION
REGION ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA
TERHADAP KEDAULATAN WILAYAH UDARA INDONESIA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Rabu**
Tanggal : **12 Juli 2023**
Tempat : **Ruang dosen lantai 2**

Susunan Tim Penguji

Ketua : **Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**
Sekretaris : **Nanda Indrawati, S.H., M.H.**
Penguji : **Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.**

Tanda Tangan

**Mengesahkan Dekan Fakultas
Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum.

HALAMAN MOTTO

“SIC PARVIS MAGNA”
- Sir Francis Drake



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku



Pamulang, 22 Juni 2023

Penulis

Steven Garuda P.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat Rahmat, kasih karunia, dan atas segala hikmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Penulisan hukum/skripsi berjudul “Implikasi Yuridis Perjanjian Flight Information Region Antara Indonesia Dengan Singapura Terhadap Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia”.

Penulisan hukum/skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Ilmu Hukum Strata-1 di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak masukan dan kritik membangun, yang tentunya memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Tuhan Yesus atas segala hikmat karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan serta telah membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M, selaku Rektor dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan dan segenap jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

4. Ibu Nanda Indrawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pandangan, arah, dan kritik terkait penulisan hukum/skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tua saya, Baby Putri Annabella, Destenka Annastasia Pricilalaland, dan Melisa Zebadiah, selaku adik – adik saya, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa selama penulis mengerjakan skripsi ini.
6. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
7. Bapak Muhammad Taufan Ph.D selaku narasumber dari bagian Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
8. Kepada Zsa – Zsa Wihelmina Antioinette sebagai orang yang selalu memberikan saya dukungan dan motivasi serta tegangan mental karena kelakuannya.
9. Seluruh teman – teman Fakultas Hukum, Sonba, Suksmo, Bastian, Endah, Yudha, serta teman lainnya yang telah membantu, memberikan inspirasi, saran, dan menyemangati penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini
10. Seluruh teman – teman dari pengangguran santai, Gilang, Cengek, Ojan, Abay, Dito, serta teman lainnya, dan dari Kodok – Kodok Sombong, serta nnq reborn, yang tiada hentinya memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

ABSTRACT

Territorial sovereignty is the sovereignty of a state when exercising exclusive jurisdiction over its territory. The territory of a country is divided into three, namely land, sea and air. To obtain full sovereignty, all parts of the territory must be claimed. Indonesia is an archipelagic country that has many islands. The territorial area owned by Indonesia is quite large. However, not all of the islands in Indonesia are owned exclusively by Indonesia due to an agreement between the Indonesian Flight Information Region and Singapore which regulates the authority to carry out air control around the islands of Riau and Natuna. On January 21, Indonesia and Singapore agreed to make adjustments to airspace services or the Flight Information Region, which regulates so that Indonesia can take back control of the airspace around the islands of Riau and Natuna. However, after the holding of the Flight Information Region agreement between Indonesia and Singapore, the agreement was not in accordance with the mandate of Law Number 1 of 2009 concerning aviation. The non-fulfillment of the mandate of the law results in the non-fulfillment of the full and exclusive airspace sovereignty in Indonesia.

Keywords: *Flight Information Region, Air Traffic Control, Aviation Regulation, Riau and Natuna*

DAFTAR ISI

PENULISAN HUKUM	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	11
BAB II PEMBAHASAN	15
A. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN FIR INDONESIA-SINGAPURA ...	15
1. Tinjauan tentang Perjanjian Internasional.....	15
2. Tinjauan Tentang Flight Information Region	18
3. Pengertian Ratifikasi.....	24
B. KONSEP KEDAULATAN NEGARA	26
1. Kedaulatan Negara dalam Konvensi Chicago 1944.....	26
2. Teori Batasan Kedaulatan Udara.....	28

C. IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN FIR ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA	32
BAB III PENUTUP	40
A. KESIMPULAN.....	40
B. SARAN.....	41
DAFTAR PUSTAKA	42

